



Judul Skripsi :

**GAGASAN PROGRAM REMUNISIPALISASI (*REMUNICIPALISATION*)
PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
Dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

**Nama : Aprilia Zul Pratiwiningrum
NIM : 1510611011**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
2019**



**GAGASAN PROGRAM REMUNISIPALISASI
(*REMUNICIPALISATION*) PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI
DKI JAKARTA**

SKRIPSI

APRILIA ZUL PRATIWININGRUM

1510611011

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2019



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

GAGASAN PROGRAM REMUNISIPALISASI (*REMUNICIPALISATION*)
PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI DKI JAKARTA

APRILIA ZUL PRATIWININGRUM

15106H1011

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 11 Juli 2019

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.)

Kaprodi

(Khoirur Razaf Lutfi, S.H., M.H.)

Pembimbing

(Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.)



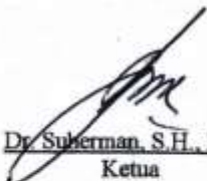
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :


Nama : Aprilia Zul Pratiwiningrum
NPM : 1510611011
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Gagasan Program Remunipalisasi (*Remunicipalisation*) Pengelolaan Air di Provinsi DKI Jakarta


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.


Dr. Suherman, S.H., LL.M
Ketua


M. Helmi Fakhrazi, S.H., S.H., M.H
Anggota I


Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H
Anggota II


Dwi Desi Yavi Tarina, S.H., M.H
Dekan


Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H
Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 11 Juli 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan skripsi ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Aprilia Zul Pratiwiningrum
NPM : 1510611011
Tanggal : 11 Juli 2019
Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprilia Zul Pratiwiningrum
NPM : 1510611011
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"Gagasan Program Remunicipalisasi (*Remunicipalisation*) Pengelolaan Air
di Provinsi DKI Jakarta"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2019

Yang menyatakan,



Aprilia Zul Pratiwiningrum

GAGASAN PROGRAM REMUNISIPALISASI PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI DKI JAKARTA

Aprilia Zul Pratiwiningrum

Abstrak

Latar belakang skripsi ini membahas tentang program remunisipalisasi pengelolaan air yang akan segera diterapkan di DKI Jakarta. Remunisipalisasi pengelolaan air ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akibat kekecewaan pemerintah dan masyarakat atas kinerja dua perusahaan swasta pengelola air, yaitu PT. Aetra Air Jakarta dan PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) yang buruk. Setelah 22 tahun berjalan, yaitu sejak 1997, pengelolaan air di DKI Jakarta tak banyak mengalami peningkatan. Banyak masyarakat yang belum terjangkau air pipa, kebocoran air yang masih tinggi, dan pipa-pipa yang masih tua. Selain itu, sejak awal, pembuatan kontrak Perjanjian Kerja Sama antara PAM Jaya dengan PT. Aetra Air Jakarta dan PT. Palyja sudah menyalahi konstitusi dan tidak berdasarkan tender yang adil. Karenanya, masyarakat menuntut penghentian privatisasi air ini dan mengajukan Gugatan Warga Negara (CLS) Akibat Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. Gugatan tersebut menang di Tingkat Pertama, lalu kalah di Tingkat Banding, kemudian menang di Tingkat Kasasi, dan kalah di Tingkat Peninjauan Kembali. Meskipun kalah, namun masyarakat tetap menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembalikan pengelolaan air kepada publik. Atas desakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Tata Kelola Air yang bertugas untuk mengkaji solusi atas permasalahan pengelolaan air di DKI Jakarta. Tim Tata Kelola Air pun merekomendasikan tiga opsi, yaitu status quo, pemutusan kontrak sepihak, dan pengambilalihan secara perdata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih menggunakan opsi ketiga, yaitu pengambilalihan secara perdata. Sayangnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih tidak transparan dalam hal ini dan belum melibatkan masyarakat. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan data dan analisis terhadap permasalahan ini maka sudah tepat apabila opsi pengambilalihan secara perdata yang dipilih. Namun, pengambilalihan ini harusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan peran aktif masyarakat. Maka, dalam kesimpulan kasus ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan untuk bersikap transparan dan mencontoh dari kota-kota di dunia yang telah melakukan remunisipalisasi.

Kata Kunci: Privatisasi Air, Remunisipalisasi Air, DKI Jakarta.

**THE IDEAS OF WATER MANAGEMENT
REMUNICIPALISATION PROGRAM IN DKI JAKARTA
PROVINCE**

Aprilia Zul Pratiwiningrum

Abstract

The background of this paper is to discuss about the water management remunicipalisation program that will soon be implemented in DKI Jakarta. The remunicipalisation of water management was carried out by the DKI Jakarta Government due to the dissatisfaction of the government and the public over the bad performances of two private water management companies named PT. Aetra Air Jakarta dan PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). After 22 years, since 1997, water management in DKI Jakarta hasn't improve that much. Many people haven't been reached by piped water, high water leaks, and old pipes. In addition, from the start, the contract of the Cooperation Agreement between PAM Jaya and PT. Aetra Air Jakarta and PT. Palyja has violated the constitution and is not based on fair tenders. Therefore, the community demanded the cessation of the privatization of water and proposed a Citizen Law Suit (CLS) due to illegal acts by the authorities. The lawsuit wins on the First Level, then loses at the Appeal Level, then wins at the Cassation Level, and loses at the Judgment Level. Despite losing, the community still demands the DKI Jakarta Government to restore water management to the public. At the urging, the Government of DKI Jakarta formed a Water Management Team whose task was to review solutions to the problems of water management in DKI Jakarta. The Water Management Team recommends three options, that are the status quo, termination of unilateral contracts, and civil takeovers. The DKI Jakarta Government has chosen to use the third option, which is a civil takeover. Unfortunately, the DKI Jakarta Government is still not transparent in this matter and has not involved the community. The method used for this study is normative juridical. Based on the data and analysis of this problem, it is appropriate if the option for the civil takeover is chosen. However, this takeover must be carried out openly and involve the active role of the community. So, in the conclusion of this case, the Provincial Government of DKI Jakarta is expected to be transparent and imitate the cities in the world that have done remunicipalisation.

Key Words: Water Privatization, Water Remunicipalisation, DKI Jakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Gagasan Program Remunipalisasi Pengelolaan Air di Provinsi DKI Jakarta. Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Meskipun begitu, penulis tetap berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik mungkin agar ia dapat berguna dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Karenanya, penulis selalu menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara morel maupun secara materiel sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, dengan ketulusan hati paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Ibu Dr. Erna Hernawati selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
3. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sekaligus Ketua Penguji Skripsi penulis;
4. Bapak Subur, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
6. Ibu Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N. selaku Kepala Jurusan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;

7. Bapak Khoirur Rizal L, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
8. Bapak Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis sekaligus Anggota Penguji II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing penulis;
9. Bapak Dr. Taufiqqurohman Syahuri, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji proposal skripsi penulis;
10. Bapak Robinsar Marbun S.H., M.H. selaku Anggota Penguji I proposal skripsi penulis;
11. Bapak M. Helmi Fakhrazi, S.H.I, S.H, M.H selaku Anggota Penguji II sripsi penulis;
12. Bapak Heru Suyanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
13. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional :Veteran” Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
14. Orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Tri Utomo Djati dan Ibu Miyamti yang selalu bersabar dalam menghadapi anak-anaknya dan tak kenal lelah untuk mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Adik tersayang, Iqbal Jati Kusuma yang juga selalu bersabar dalam menghadapi kakaknya dan sebentar lagi akan berjuang untuk menghadapi Ujian Nasional. Semangat;
16. Penyelamat skripsi penulis, Hikmah Oktaviani yang selalu membantu penulis melewati masa-masa krisis;
17. Pemberi ide bagi skripsi penulis, Mas Andreas Harsono, Mbak Sapariah Saturi, dan Bang Haris;
18. Narasumber penulis, Mas Reza dan Mas Sigit dari KRuHA, Mbak Jeanny dari LBH Jakarta, dan Mbak Nila Ardhianie dari Amrta Institute;
19. Sahabat-sahabat penulis yang juga sedang berjuang, Karin, Irfan, Sari, Shabrina, dan yang akan berjuang untuk tahun depan, Mutia dan Desya;

20. Seluruh Anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Aspirasi, terkhusus untuk angkatan ke-32, Donal C.S, Triditarini S, Deden A.Q.S, Sandy M. W, Salma D.W, Sasgia R.C;
21. Kucing-kucing penulis, Puma Ndut, Choco, Moka, Thomas, Ncil yang selalu bisa meredakan stres dan lelah penulis;
22. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum UPNVJ;
23. Serta semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu namun telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 11 Juli 2019

Aprilia Zul Pratiwiningrum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Perumusan Masalah	7
I.3 Ruang Lingkup Penelitian	7
I.4 Tujuan dan Manfaat Penyusunan	8
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
I.6 Metode Penelitian	12
I.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM ATAS PRIVATISASI AIR DAN REMUNISIPALISASI AIR	17
II.1 Pengertian Privatisasi	17
II.2 Privatisasi Air di Provinsi DKI Jakarta	19
II.3 Kontrak Privatisasi Pengelolaan Air di DKI Jakarta	24
II.4 Dampak Privatisasi Air terhadap Masyarakat DKI Jakarta	29
II.5 Remunipalisasi dan Penerapannya di Kota-Kota Dunia	35
BAB III GUGATAN WARGA NEGARA ATAS PRIVATISASI PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI DKI JAKARTA	40
III.1 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST	40
III.2 Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 588/PDT/2015/PT.DKI ..	47
III.3 Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 31K/PDT/2017 ...	51
III.4 Analisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 31K/PDT/2017	57
BAB IV ANALISIS TERHADAP PROGRAM REMUNISIPALISASI AIR DI DKI JAKARTA	62
IV.1 Tindakan yang Dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta unuk Mengambilalih Pengelolaan Air di Provinsi DKI Jakarta	62
a Status Quo	64
b Pemutusan Kontrak Secara Sepihak	68

c	Pengambilalihan Secara Perdata	73
IV.2	Model Kebijakan untuk Pengelolaan Air di DKI Jakarta	81
a	Melibatkan Masyarakat dalam Pengelolaan Air	82
b	Menjunjung Akuntabilitas dan Transparansi Publik.....	85
c	Memaksimumkan Peran Pekerja dalam Pengelolaan Air	87
d	Merancang dengan Matang Strategi dan Manajemen Pengelolaan Air	92
e	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	95
f	Berhati-hati dengan Keterlibatan Politik	97
g	Ancaman Terhadap Remunisasi.....	99
BAB V PENUTUP		102
V.1	Kesimpulan	102
V.2	Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

REVISI HASIL SIDANG KOMPRESIF/SKRIPSI

KARTU MONITORING

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Air di Provinsi DKI Jakarta	27
Tabel 2.2 Tarif Air di Kota-Kota Besar di Indonesia.....	30
Tabel 3.1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/PDT.G/2012/PN.JKT.PST	40
Tabel 3.2 Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 588/PDT/2015/PT.DKI	47
Tabel 3.3 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017.....	51
Tabel 3.4 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 841 PK/Pdt/2018	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Cakupan Wilayah PT. Aetra Air Jakarta dan PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja).....	23
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 841 PK/Pdt/2018
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara dengan Muhammad Reza, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara dengan Jeanny Sirait, Advokat LBH Jakarta
- Lampiran 4 Hasil Turnitin